

**Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia: Pembangunan Pangkalan Militer
di Laut Merah 2020-2025**

**Nahar Maulana Maarif, Jiehan Pratama Saksananta, Shakira Adriana Handriza,
Prihandono Wibowo**

Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

¹21044010073@student.upnjatim.ac.id, ²21044010096@student.upnjatim.ac.id,

³21044010099@student.upnjatim.ac.id, ⁴prihandonowibowo79@gmail.com

ABSTRACT

Russia's plan to establish a military base in the Red Sea region through the coast of Sudan is one of the geopolitical and foreign policy developments in international dynamics experiencing a significant surge. Since the meeting between then Sudanese President Omar Al-Bashir and Russian President Vladimir Putin in Sochi in November 2017, Russia's aspirations in the Red Sea region have increased. Russia has continued its efforts to penetrate the Red Sea region in various ways, seeking logistical and legal loopholes, forming alliances with countries such as Turkey, and putting pressure on the Gulf states, especially Saudi Arabia, while exploiting and complicating the situation. To analyze the dynamics of Russian foreign policy in the Red Sea, the author uses the Foreign Policy Decision Making Theory proposed by William D. Coplin in his work entitled "Foreign Policy Decision-making", that in the process of formulating foreign policy, there are at least three basic factors that are taken into consideration by policy makers Domestic Politics, Economic and Military Capability, and International Context. In making this decision, the Russian President considered several things such as positive support from domestic policy influencers, Russia's economic independence, and the presence of the Russian military, either under Wagner or the Ministry of Defense in Sudan. With the inauguration of the construction of Russian military bases in Sudan, Russia can expand its geopolitical influence in the Red Sea region, in line with its foreign policy objectives to create a balance of power with Western powers in the Middle East.

Keywords: *foreign policy; military bases; Russia; Wagner Group*

ABSTRAK

Rencana Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di kawasan Laut Merah melalui pesisir Sudan merupakan salah satu perkembangan geopolitik dan kebijakan luar negeri dalam dinamika internasional mengalami lonjakan yang signifikan. Sejak pertemuan antara Presiden Sudan saat itu, Omar Al-Bashir, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Sochi pada November 2017, aspirasi Rusia di wilayah Laut Merah mengalami peningkatan. Rusia terus berupaya dengan berbagai cara untuk menembus kawasan Laut Merah, dengan mencari celah logistik dan hukum, membentuk aliansi dengan negara seperti Turki, serta memberikan tekanan pada negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, bersamaan dengan mengeksploitasi dan memperumit situasi. Untuk menganalisis dinamika kebijakan luar negeri Rusia di Laut Merah, penulis menggunakan Teori *Foreign Policy Decision Making* yang dikemukakan oleh William D. Coplin, bahwa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, setidaknya terdapat tiga faktor dasar yang menjadi pertimbangan para perumus kebijakan *Domestic Politics, Economic and Military Capability*, dan *International Context*. Dalam mengambil keputusan tersebut, Presiden Rusia mempertimbangkan beberapa hal seperti, dukungan positif dari *policy influencer* dalam negeri, kemandirian ekonomi Rusia, serta

kehadiran militer Rusia, baik di bawah Wagner ataupun Kementerian Pertahanan di Sudan. Dengan peresmian pembangunan pangkalan militer Rusia di Sudan, Rusia dapat meluaskan pengaruh geopolitiknya di kawasan Laut Merah, sejalan dengan tujuan politik luar negerinya untuk menciptakan *balance of power* dengan kekuatan Barat di Timur Tengah.

Kata Kunci: grup Wagner, kebijakan luar negeri, pangkalan militer, Rusia

PENDAHULUAN

Perkembangan geopolitik dan kebijakan luar negeri dalam dinamika internasional mengalami lonjakan yang signifikan. Perkembangan tersebut salah satunya adalah rencana Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di kawasan Laut Merah melalui pesisir Sudan. Sejak pertemuan antara Presiden Sudan saat itu, Omar Al-Bashir, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Sochi pada November 2017, aspirasi Rusia di wilayah Laut Merah mengalami peningkatan. Kepentingan Rusia di kawasan ini mencakup aspek ekonomi, keamanan, dan diplomatik, dengan tujuan menyaingi dominasi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta memperkuat citranya sebagai pihak yang berkontribusi pada stabilitas kawasan. Upaya Rusia memperluas pengaruhnya di Laut Merah juga tidak terlepas dari strategi besarnya untuk membina hubungan diplomatik dan militer yang lebih erat di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini masuk akal secara geografis, karena Laut Merah menjadi jalur penting menuju kawasan Samudra Hindia, yang strategis bagi kepentingan global Rusia.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengunjungi Sudan pada 8 Februari 2023, pembahasan mengenai pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Sudan kembali dibuka. Peristiwa ini menjadi contoh nyata dari fenomena multipolaritas di kawasan, karena menimbulkan kebingungan dan ketegangan antara negara-negara kawasan satu sama lain dan juga antara negara-negara kawasan dengan negara-negara Barat. Kunjungan Lavrov tersebut bertepatan dengan kunjungan enam pejabat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa ke Sudan.

Perjanjian selama 25 tahun tersebut memungkinkan penempatan hingga empat kapal perang, termasuk kapal bertenaga nuklir, dan kehadiran hingga 300 tentara. Dengan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi, dan jumlah personel militer dapat ditambah. Rusia sempat memberi kesan bahwa pangkalan tersebut sudah mulai beroperasi dan bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Sudan sudah menerima kapal-kapal Rusia pada tahun 2019.

Rusia terus berupaya dengan berbagai cara untuk menembus kawasan Laut Merah, dengan mencari celah logistik dan hukum, membentuk aliansi dengan negara seperti Turki, serta memberikan tekanan pada negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, bersamaan dengan mengeksploitasi dan memperumit situasi. Salah satu tawaran utama Rusia kepada Sudan adalah perlindungan fisik terhadap Dewan Militer Transisi Sudan dan perlindungan terhadap ketuanya – yang saat ini menjadi kepala negara *de facto* Sudan – Abdel Fattah al-Burhan.

Hal ini mungkin menjelaskan keberadaan elemen-elemen perusahaan militer swasta Rusia, “Grup Wagner”. Kebijakan Rusia adalah membekukan konflik atau menciptakan perpecahan untuk memperlumit urusan internal benua Afrika, karena kedua metode tersebut meningkatkan kebutuhan akan campur tangan Rusia di Afrika. “Wagner cenderung menargetkan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Moskow – seperti tambang emas di Sudan, yang hasil emasnya dapat dijual dengan cara yang menghindari sanksi Barat,” kata Catrina Doxsee, seorang pakar Wagner di Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington.

Jika benar adanya kebingungan terkait kembalinya militer Rusia ke Sudan, maka hal ini berarti bahwa armada Rusia telah semakin dekat dengan negara-negara Timur Tengah dan kawasan strategis di sekitar Terusan Suez. Selain itu, untuk pertama kalinya kehadiran militer Rusia di Laut Merah diperkuat, bersamaan dengan upaya Rusia untuk menembus Afrika Utara dan memperluas kehadiran militer dan keamanannya di sana. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut sebagai arena konfrontasi antara Rusia dan Barat. Sudan akan menjadi negara Afrika pertama di pesisir Laut Merah yang mengizinkan pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di wilayahnya. Demi menjaga sensitivitas diplomatik dan menghindari pertimbangan hukum, Rusia dengan sengaja menggunakan istilah “Pusat Logistik”. Namun, dengan dalih eskalasi situasi di Afrika, pusat logistik tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi pangkalan militer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses perumusan kebijakan pembangunan pangkalan militer Rusia di kawasan Laut Merah pada kurun waktu 2020-2025 melalui pendekatan analisis kebijakan luar negeri. Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan seputar kebijakan luar negeri dan pembangunan pangkalan militer asing sebagai referensi untuk mengembangkan tulisan ini. Beberapa di antaranya adalah, *Indian Foreign Policy Responds to the U.S. Pivot* oleh Harsh V. Pant dan Yogesh Joshi (2015), yang menuliskan analisis kebijakan luar negeri India terhadap “pivot” Amerika Serikat ke Asia bahwa India tidak sepenuhnya beraliansi namun juga tidak menolak kerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjaga otonomi strategis serta mengimbangi ekspansi China di Samudera Hindia, serta tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Cina untuk menghindari konflik terbuka (Pant, H. V., Joshi, Y., 2015).

Kemudian, Analisis Terhadap Pembangunan Pangkalan Militer India di Mauritius oleh M. Afif Sudirman (2024), yang berisikan tindakan India sebagai respons terhadap sistem internasional yang anarkis di mana negara berusaha meningkatkan kapabilitas militer dan ekonomi untuk memperkuat posisi strategis di Samudera Hindia menurut neo-realisme dan keamanan internasional. Pembangunan ini memungkinkan India untuk mendominasi aktivitas regional melalui partisipasi dalam forum multilateral, patroli maritim, dan penguatan aliansi dengan Mauritius (Sudirman, 2024).

Dan tinjauan terakhir, *Kepentingan Djibouti dalam Menerima Pangkalan Militer Asing Tiongkok Tahun 2017* oleh Putra Ari Handoyo (2025), yang dimana

Djibouti memanfaatkan posisi geostrategis untuk menarik investasi asing menggunakan realisme struktural sehingga mendapat manfaat ekonomi dari sewa pangkalan militer Tiongkok. Keberadaan pangkalan Tiongkok juga membantu Djibouti mengatasi ancaman teroris Al-Shabaab dan menjadikan Djibouti pusat persaingan antara Amerika Serikat dan Cina sebagai logistik operasi anti-*piracy* di Teluk Aden (Handoyo, 2025). Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus kepada proses perumusan kebijakan pembangunan pangkalan militer Rusia di Laut Merah 2020-2025 dengan menggunakan teori *Foreign Policy Decision Making* yang dirumuskan oleh William D. Coplin.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau kondisi tertentu dalam masyarakat secara sistematis dan terperinci. Teknik analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi makna dan konteks di balik data yang dikumpulkan sehingga berbeda dengan analisis kuantitatif yang berfokus pada pengolahan data berbentuk angka. Analisis kualitatif melibatkan beberapa langkah seperti pengumpulan data, pengorganisasian, dan identifikasi tema atau pola yang muncul dari informasi yang diperoleh (Moleong, 2017).

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat data kepustakaan, yang nantinya data tersebut diolah sebagai bahan penelitian terhadap topik penelitian (Zed, 2008). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, laman resmi Pemerintah Rusia, serta data sekunder resmi dari pihak kedua yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penulis menetapkan jangkauan penelitian dengan jangkauan awal pada November 2020, di mana Rusia dan Sudan telah menandatangani kesepakatan awal pembangunan pangkalan militer Rusia di Sudan. Selanjutnya, penulis menetapkan jangkauan akhir penelitian pada Februari 2025, di mana Sudan secara resmi meresmikan perjanjian yang memungkinkan Rusia untuk mengangkut senjata, amunisi, serta logistik militer melalui pelabuhan dan bandara di Sudan.

Teori *Foreign Policy Decision-making*

Untuk menganalisis dinamika kebijakan luar negeri Rusia di Laut Merah, penulis menggunakan Teori *Foreign Policy Decision Making* yang dikemukakan oleh William D. Coplin dalam karyanya yang berjudul "*Foreign Policy Decision-making*". Teori ini digunakan karena dapat menjelaskan bagaimana dinamika perumusan kebijakan suatu negara yang nantinya akan menghasilkan tindakan negara dalam konteks global. Coplin menjelaskan bahwa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, setidaknya terdapat tiga faktor dasar yang menjadi pertimbangan para perumus kebijakan. Faktor pertama adalah *Domestic Politics*, yang dapat dimaknai

sebagai kondisi politik dalam negeri yang menjadi faktor utama dalam proses perumusan kebijakan. Dalam *domestic politics* juga terdapat *policy influencers*, yaitu aktor-aktor politik dalam negeri yang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Faktor kedua adalah *Economic and Military Capability*, di mana faktor ini dapat dimaknai sebagai kapabilitas negara, baik secara ekonomi maupun secara militer, untuk melaksanakan dan mempertahankan suatu kebijakan luar negerinya. Faktor ketiga adalah *International Context*, yang dapat dimaknai sebagai kedudukan sebuah negara dalam suatu sistem global, meliputi sistem geopolitik, geoekonomi, serta hubungan dengan negara-negara terkait dalam satu sistem tersebut.

Konsep Politik Domestik

Secara tidak langsung, politik dalam negeri dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Dalam analisisnya, Coplin mencoba untuk memetakan hubungan yang terjalin antara para pengambil keputusan (*policy maker*) dalam sebuah kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Coplin kemudian menyebut aktor politik domestik tersebut sebagai *policy influencer*. Selanjutnya, Coplin mengklasifikasikan *policy influencer* ke dalam empat kategori, yaitu (1) *bureaucratic influencer*, (2) *partisan influencer*, (3) *interest influencer*, serta (4) *mass influencer* (Coplin, 1974).

Bureaucratic influencer adalah beberapa individu serta organisasi-organisasi yang tergabung di dalam lembaga eksekutif pemerintah. Mereka biasanya membantu aktor *policy maker* untuk menyusun ataupun mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, *bureaucratic influencer* memiliki pengaruh yang besar, karena mereka berperan untuk menyalurkan informasi kepada aktor *policy maker*. Selain itu, mereka juga berperan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh aktor *policy maker* setelahnya. Dalam beberapa kasus, aktor *bureaucratic influencer* juga tergabung dalam jajaran aktor *policy maker*, yang kemudian menyulitkan penggambaran garis pemisah yang jelas untuk membedakan *bureaucratic influencer* sebagai *policy influencer* dengan aktor *policy maker*.

Partisan influencer adalah berbagai partai politik yang berperan untuk menyuarakan tuntutan masyarakat dalam bentuk tuntutan politik. Tuntutan tersebut biasanya disuarakan kepada aktor *policy maker* terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Dalam perumusan kebijakan luar negeri, *partisan influencer* biasanya berperan untuk mempengaruhi kebijakan melalui tindakannya menekan pemerintah dengan menyediakan aktor-aktor yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

Interest influencer adalah individu-individu yang tergabung dalam sebuah kepentingan yang sama. Biasanya, keberadaan mereka masih belum cukup besar dan luas untuk menjadi bagian dari partai politik, tetapi mereka dapat mengumpulkan berbagai sumber daya untuk mendapatkan dukungan dari *policy maker*. *Interest influencer* dapat melakukan beberapa teknik untuk mendapatkan dukungan *policy maker* atas kepentingan mereka. Pada beberapa kasus, mereka dapat melakukan sebuah kampanye untuk menyampaikan pesan, tidak hanya kepada *policy maker*,

namun juga kepada *bureaucratic influencer* serta partisan *influencer*. Dalam beberapa kasus lain, mereka dapat menjanjikan dukungan finansial bagi *policy maker* untuk menunjang keputusannya, bahkan sebaliknya, mereka juga bisa memutus dukungan finansial untuk menghambat *policy maker* memutuskan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, keberadaan *interest influencer* memiliki peran dalam proses perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara.

Terakhir, *Mass influencer*, adalah opini masyarakat yang menjadi pertimbangan *policy maker* untuk merumuskan sebuah kebijakan luar negeri. Dalam analisisnya, Coplin mencoba untuk membandingkan situasi *mass influencer* dari negara penganut sistem politik tertutup dengan negara penganut sistem politik terbuka. Pada sistem politik tertutup, aktor *policy maker* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap masyarakat. Beberapa contohnya adalah kontrol atas media massa serta penerapan sensor terhadap sebuah pendapat, sehingga menyebabkan tingginya peluang praktik manipulasi oleh para aktor *policy maker*. Sedangkan pada sistem politik terbuka, peluang praktik manipulasi oleh *policy maker* terhitung rendah, dengan lebih luasnya iklim opini publik. Meskipun demikian, menurut Coplin, kebebasan opini publik pada negara penganut sistem politik terbuka tidak sebebaskan di negara-negara demokrasi. Coplin juga berpendapat bahwa *mass influencer* dalam bentuk opini publik biasanya digunakan *policy maker* justru untuk menjustifikasi manuver-manuver politik luar negeri, bukannya untuk merumuskan sebuah kebijakan luar negeri.

Konsep Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, bidang ekonomi dan militer adalah dua variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Coplin merumuskan beberapa indikator pertimbangan dalam dimensi kemampuan ekonomi seperti (1) Kapasitas Produksi Barang dan Jasa, (2) Ketergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional; serta beberapa indikator dalam dimensi kemampuan militer seperti (1) Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer, (2) Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri, serta (3) Ketidakstabilan Internal dan Kemampuan Militer. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan kelemahan negaranya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Dalam analisisnya, Coplin berpendapat bahwa dengan meningkatnya kapabilitas militer, maka ekonomi sebuah negara juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika kapabilitas ekonomi sebuah negara meningkat, maka kapabilitas militer juga akan meningkat. Selain itu, Coplin juga berpendapat bahwa negara industri cenderung memiliki peralatan militer yang lebih mumpuni dibandingkan dengan negara agraris (Coplin, 1974).

Coplin mengemukakan tiga faktor utama yang mempengaruhi kapabilitas militer sebuah negara, yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan militer, serta perlengkapan militer. Meskipun setiap negara memiliki kapabilitas militer yang berbeda, tetapi dengan melihat tiga faktor tersebut sebagai pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, maka *policy maker* dapat menilai seberapa efektif sebuah kebijakan yang dirumuskannya (Coplin, 1974). Pada akhirnya, kapabilitas militer dan kapabilitas ekonomi adalah dua unsur dominan yang dapat

berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai pemberi tekanan bagi negara lain.

Konsep Konteks Internasional

Coplin berpendapat bahwa terdapat tiga faktor penting dalam diskursus konteks internasional, yaitu faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor politik. Sehubungan dengan hal tersebut, Coplin mengemukakan bahwa lingkungan internasional sebuah negara terdiri dari lokasi geografis yang didudukinya, di mana terdapat hubungan dengan negara-negara lain yang berada di sekitarnya. Selain itu, lingkungan internasional sebuah negara juga dinilai dari hubungan-hubungan ekonomi dan politik negara tersebut dengan negara lain. Sehingga, geopolitik sebuah negara merupakan salah satu aspek penting dalam politik luar negerinya.

Selain geopolitik, Coplin juga menjelaskan pentingnya aspek hubungan ekonomi dan hubungan politik yang berkaitan satu sama lain. Hubungan ekonomi memungkinkan sebuah negara untuk menerima arus modal, sehingga negara cenderung akan bergantung kepada negara lain. Selanjutnya, hubungan politik sebuah negara dengan negara-negara lain dalam lingkungan internasionalnya berperan penting untuk proses perumusan kebijakan luar negerinya (Coplin, 1974).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Internasional: Dinamika Geopolitik Rusia di Laut Merah

Laut Merah merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika melalui Terusan Suez. Sejak tahun 2020, Rusia telah berupaya untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Laut Merah melalui rencana pendirian pangkalan militer di Port Sudan. Langkah ini menggambarkan strategi kebijakan luar negeri Rusia yang berorientasi pada peningkatan pengaruh geopolitik, pengamanan jalur perdagangan, dan penguatan posisi tawar menawar internasional. Dibentuknya pangkalan militer Rusia pada Laut Merah memungkinkan peningkatan pengaruh di kawasan yang dekat dengan jalur pelayaran utama ke kawasan Afrika Timur dan Timur Tengah, seperti negara penghasil energi yaitu Arab Saudi dan Yaman serta menyeimbangkan pengaruh negara Barat yang memiliki pangkalan militer di Djibouti seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Jepang. Posisi geografis ini memberikan akses langsung ke Laut Merah dan Samudera Hindia untuk operasi militer dan logistik Rusia di kawasan Laut Merah (Africa Defense Forum, 2025).

Sudan muncul sebagai satu-satunya negara di kawasan Laut Merah yang secara eksplisit menjalin kerja sama dengan Rusia dalam pembangunan pangkalan militer. Kesepakatan awal antara kedua negara terjadi pada tahun 2020 ketika Sudan menandatangani perjanjian yang memberikan Rusia hak untuk membangun pangkalan militer di Port Sudan dengan masa berlaku 25 tahun dan opsi perpanjangan selama 10 tahun. (Aljazeera, 2020). Pangkalan militer di Port Sudan dirancang untuk menampung sekitar 300 personel militer sipil dan mampu menampung hingga empat kapal perang termasuk kapal bertenaga yang

menunjukkan ambisi Rusia dalam memperluas posisi kekuatannya di wilayah ini. (Africa Defense Forum, 2025)

Proses kerja sama ini sempat mengalami penundaan akibat tekanan politik dari Sudan maupun komunitas internasional. Hingga, pada Februari 2025, Sudan secara resmi mengesahkan perjanjian tersebut dan memberikan hak eksklusif kepada Rusia untuk mengangkut senjata, amunisi, dan logistik melalui pelabuhan dan bandara di Sudan (Kurnialam, 2020). Rusia memberikan kompensasi berupa bantuan militer, investasi di sektor pertambangan emas dan uranium, serta dukungan politik terhadap rezim militer Sudan yang saat itu menghadapi berbagai tantangan domestik (Schwikowski, 2025). Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi Sudan untuk mendapatkan dukungan internasional dan memperkuat stabilitas rezim melalui aliansi dengan Rusia sebagai kekuatan besar (Kurnialam, 2020).

Laut Merah merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Eropa dan Asia. Serangan dari kelompok Houthi di Yaman terhadap kapal komersial tentu mengganggu jalur perdagangan di Laut Merah yang menyebabkan penurunan lalu lintas kapal dan meningkatkan biaya logistik global. Dengan mendirikan pangkalan militer di Port Sudan, Rusia mampu berperan dalam menjaga stabilitas keamanan jalur perdagangan pada wilayah Laut Merah. Sehingga, kemudian meningkatkan posisi dalam negosiasi ekonomi dan perdagangan dengan negara pengguna (*user states*) di Laut Merah (Tsamalashvili, 2025). Rusia juga memperoleh akses ke sumber daya alam strategis di Sudan, seperti pertambangan emas dan uranium melalui perjanjian konsesi pertambangan dengan perusahaan Rusia dan Kementerian Pertambangan Sudan (BBC, 2023). Sumber daya ini menjadi penting dalam menghadapi sanksi internasional dan memperkuat posisi ekonomi Rusia di pasar global.

Kebijakan pembangunan pangkalan militer oleh Rusia merupakan respons terhadap dinamika persaingan global terutama dengan negara Barat. Persaingan dengan negara Barat terutama setelah sanksi ekonomi yang diberlakukan pasca-invasi Ukraina mendorong Rusia untuk mencari alternatif dalam pengaruhnya. Pendirian pangkalan militer Rusia mencerminkan upaya dalam memperluas pengaruh Rusia di Afrika dan Timur Tengah. Pembangunan pangkalan di Sudan merupakan respons terhadap ketidakstabilan politik di Suriah yang sebelumnya menjadi lokasi penting bagi pangkalan militer Rusia (Fatunnisa, 2025). Rusia memanfaatkan peluang instabilitas politik domestik di Sudan dan kawasan sekitarnya untuk memperluas pengaruh dan memperkuat posisi dalam politik internasional.

Rusia telah lama menjalin kerja sama militer dengan Sudan dengan sebagian besar pasokan senjata Sudan berasal dari Rusia. Meskipun terdapat konflik internal politik di Sudan, kelompok militer Sudan telah menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian pangkalan militer setelah meninjau kesepakatan dengan Rusia. Dengan mendukung rezim militer Sudan dalam menghadapi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang didukung oleh Uni Emirat Arab, Rusia memperkuat posisinya sebagai kekuatan global yang mampu menjaga keamanan kawasan strategis.

Kehadiran militer Rusia di kawasan Laut Merah menjadi instrumen *hard power* untuk mendukung sekutu, menekan lawan dan meningkatkan legitimasi global Rusia sebagai kekuatan besar yang dapat menjaga keamanan kawasan strategis (Cam, 2024).

Sementara itu, negara-negara lain di sekitar Laut Merah seperti Eritrea, Yaman, Arab Saudi, dan Djibouti tidak menunjukkan adanya indikasi kerja sama serupa dengan Rusia dalam pembangunan pangkalan militer. Djibouti telah menjadi lokasi pangkalan militer bagi Amerika Serikat, Perancis dan Tiongkok sehingga tidak ada ruang bagi Rusia untuk turut bergabung. Konflik internal berkepanjangan di Yaman dan Somalia juga membuat Rusia kurang tertarik untuk investasi militer asing. Pengaruh dari negara Barat dan aliansi regional seperti Amerika Serikat dan NATO di kawasan Laut Merah mengurangi insentif bagi negara selain Sudan seperti Arab Saudi dan Mesir untuk menjalin kerja sama militer dengan Rusia (Schwikowski, 2025).

Kondisi Politik Domestik Rusia dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Pangkalan Militer di Laut Merah

Keputusan strategis Rusia untuk membangun pangkalan militer di Port Sudan tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik domestik yang kompleks dan saling terhubung. Dalam analisis kebijakan luar negeri, Coplin mengelompokkan aktor-aktor domestik yang memengaruhi kebijakan menjadi empat kategori: *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Dalam kasus Rusia, keempat kategori ini menunjukkan pola keterlibatan yang sinergis dalam mendorong agenda ekspansi militer Rusia ke Laut Merah sebagai bagian dari upaya memperluas pengaruh geopolitik dan mengatasi isolasi internasional pasca-invasi Ukraina. Selain itu, Coplin juga menyebutkan peran pengambil keputusan yang merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab resmi ataupun pengaruh signifikan untuk membuat sebuah kebijakan politik yang melibatkan negara mereka dalam urusan internasional. Dalam kasus ini, pengambil keputusan merupakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang berperan untuk mendefinisikan nilai-nilai utama dalam kebijakan luar negeri Rusia, mengarahkan kebijakan luar negeri Rusia, serta sebagai perwakilan Federasi Rusia dalam hubungan internasional (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2023).

Peran utama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pangkalan militer di Port Sudan dipegang oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan Kementerian Luar Negeri Rusia. Kementerian Pertahanan menjadi aktor birokratis teknis yang merancang struktur operasional pangkalan, termasuk kapasitas menampung empat kapal perang dan 300 personel militer, serta hak eksklusif pengangkutan senjata melalui pelabuhan dan bandara Sudan (Aljazeera, 2020). Kementerian Luar Negeri Rusia memainkan peran diplomatik dengan membangun komunikasi resmi dengan otoritas transisi militer Sudan, serta menyampaikan kepada publik internasional bahwa pangkalan tersebut akan turut berperan dalam menjaga keamanan jalur perdagangan global (Tsamalashvili, 2025).

Dalam kerangka kebijakan luar negeri Rusia, peran aktor partisan, khususnya partai politik dominan, sangat krusial dalam membentuk dan mendukung keputusan strategis negara. Partai United Russia, yang memiliki mayoritas di Duma Negara (parlemen Rusia), berperan signifikan dalam mendukung kebijakan pembangunan pangkalan militer di Port Sudan. Sejak pengajuan perjanjian kerja sama militer antara Rusia dan Sudan pada tahun 2020, fraksi United Russia di Duma secara konsisten mendukung inisiatif tersebut. Dukungan ini tercermin dalam persetujuan anggaran pertahanan yang mencakup pembiayaan pembangunan dan operasional pangkalan militer di Port Sudan. Selain itu, anggota Duma dari United Russia aktif dalam menyuarakan pentingnya ekspansi militer Rusia ke wilayah Laut Merah sebagai upaya memperkuat posisi geopolitik Rusia di Afrika dan Timur Tengah (Africa Defense Forum, 2025).

Dukungan politik ini tidak hanya terbatas pada aspek legislatif, tetapi juga mencakup pembentukan narasi politik yang mendukung kebijakan tersebut. United Russia, melalui berbagai platform politik dan media, mempromosikan pandangan bahwa kehadiran militer Rusia di Port Sudan adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional, mengamankan jalur perdagangan internasional, dan menyeimbangkan pengaruh negara-negara Barat di kawasan tersebut. Lebih lanjut, konsolidasi dukungan politik terhadap kebijakan ini diperkuat oleh hubungan erat antara United Russia dan eksekutif negara, termasuk Presiden Vladimir Putin.

Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi implementasi kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk pembangunan pangkalan militer di luar negeri. Dalam konteks ini, peran United Russia sebagai partisan *influencer* tidak hanya terbatas pada dukungan legislatif, tetapi juga mencakup pembentukan opini publik dan legitimasi politik terhadap kebijakan ekspansi militer Rusia. Melalui kontrol atas media dan institusi politik, United Russia mampu membentuk narasi nasionalistik yang mendukung kebijakan tersebut, sehingga memperkuat dukungan domestik dan memperkecil oposisi terhadap kebijakan luar negeri Rusia di Afrika.

Pada struktur pengaruh domestik terhadap kebijakan luar negeri Rusia, kelompok kepentingan non-negara seperti Grup Wagner memainkan peran sentral sebagai *interest influencer* yang unik, karena mereka beroperasi di antara batas-batas sektor ekonomi, militer, dan politik luar negeri. Wagner bukan hanya sebuah organisasi paramiliter, tetapi juga representasi dari jaringan kepentingan oligarki-militer yang beroperasi untuk menopang kebijakan ekspansi geopolitik Rusia melalui jalur informal. Grup Wagner, yang didirikan oleh Yevgeny Prigozhin dan secara luas diyakini memiliki keterkaitan erat dengan Kementerian Pertahanan Rusia serta dinas intelijen militer (GRU), telah aktif di Sudan sejak 2017.

Aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada pelatihan militer dan pengamanan aset strategis, tetapi juga mencakup eksploitasi sumber daya alam khususnya emas. Perusahaan-perusahaan cangkang seperti Meroe Gold, anak usaha Wagner di Sudan, mendapatkan konsesi tambang emas yang luas melalui hubungan politik dengan rezim militer Sudan. Hasil eksploitasi emas ini digunakan sebagai

sumber pendanaan alternatif bagi operasi Wagner dan, secara tidak langsung, mendukung kestabilan ekonomi Rusia dalam menghadapi sanksi internasional.

Peran Wagner di Sudan juga bersifat militer dan politik. Mereka memberikan pelatihan kepada pasukan keamanan Sudan, menjaga instalasi strategis, dan berperan dalam menopang posisi rezim militer Sudan yang menghadapi tantangan dari Pasukan Dukungan Cepat (*Rapid Support Forces*, RSF). Menurut laporan Le Monde Afrique (2024), Wagner mendukung faksi militer yang pro-Moskow dan menentang faksi yang didukung oleh negara lain seperti Uni Emirat Arab (Cam, 2024). Hal ini menciptakan struktur aliansi domestik yang saling menguntungkan: rezim Sudan memperoleh perlindungan dan dukungan politik dari Rusia, sementara Wagner (dan dengan demikian Kremlin) mendapatkan pijakan militer serta akses ke jalur logistik strategis Laut Merah.

Keterlibatan Wagner sebagai *interest influencer* juga memperkuat fleksibilitas kebijakan luar negeri Rusia. Berbeda dengan entitas negara yang terikat pada hukum internasional, Wagner dapat beroperasi secara lebih fleksibel, menghindari eksposur diplomatik berlebihan bagi Rusia. Ini menjadikan Wagner sebagai instrumen kebijakan luar negeri *deniable*, yaitu kebijakan yang dapat diakui atau dibantah oleh Kremlin tergantung pada konteks internasional. Oleh karena itu, kehadiran Wagner di Sudan berfungsi sebagai pelengkap terhadap upaya resmi diplomatik dan militer Rusia, sekaligus sebagai pemulus bagi proyek pembangunan pangkalan militer di Port Sudan.

Keberadaan Wagner menunjukkan bahwa pengaruh domestik terhadap kebijakan luar negeri Rusia tidak hanya datang dari institusi formal atau perusahaan milik negara, tetapi juga dari aktor non-negara yang diakomodasi dalam sistem hibrida kekuasaan Rusia. Wagner bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi bagian dari struktur kekuasaan informal yang turut merancang dan mengimplementasikan kepentingan strategis Rusia di luar negeri. Sinergi antara Wagner dan elite militer Rusia mencerminkan bagaimana *interest influencer* dapat menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pembangunan instalasi militer di kawasan seperti Laut Merah yang memiliki nilai geostrategis tinggi.

Kategori *mass influencer* dalam kerangka Coplin mencakup opini publik, media, akademisi, dan kelompok sipil lainnya yang berkontribusi dalam membentuk persepsi serta memberikan legitimasi sosial terhadap kebijakan luar negeri negara. Dalam konteks kebijakan Rusia membangun pangkalan militer di Port Sudan, media massa dan wacana publik memainkan peran penting dalam membentuk opini domestik maupun internasional demi mendukung narasi bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional dan perlindungan kepentingan global Rusia.

Di tingkat domestik, media Rusia yang dikontrol negara seperti RT (Russia Today), Sputnik, dan RIA Novosti secara aktif membingkai pembangunan pangkalan militer di Sudan sebagai langkah strategis dalam melawan hegemoni Barat dan memperkuat posisi Rusia di kawasan Laut Merah dan Afrika Timur. Retorika yang

dibangun dalam narasi media cenderung menekankan pentingnya memperluas kehadiran militer untuk menjaga stabilitas kawasan, melindungi jalur perdagangan, serta menciptakan kemitraan dengan negara-negara “berkedaulatan” yang menolak campur tangan Barat. Dengan menekankan unsur ancaman dari NATO dan kehadiran Amerika Serikat di Djibouti, media pemerintah berfungsi sebagai alat legitimasi yang menyelaraskan opini publik dengan arah kebijakan Kremlin.

Lebih jauh, media Rusia memproduksi narasi yang menggambarkan Afrika sebagai kawasan yang membutuhkan “mitra sejati” dalam pembangunan dan keamanan. Narasi ini diperkuat dengan pemberitaan yang menunjukkan keberhasilan Rusia dalam kerja sama ekonomi dan militer dengan Sudan, termasuk dalam pemberantasan kelompok teror dan pemberdayaan sumber daya alam lokal. Dalam perspektif ini, pembangunan pangkalan militer dikonstruksikan sebagai simbol komitmen Rusia terhadap stabilitas dan pembangunan Afrika, bukan sebagai ekspansi militer imperialis.

Di sisi lain, wacana yang berkembang di media oposisi dan kanal media internasional seperti BBC, Al Jazeera, dan DW justru menyoroti keterlibatan Rusia secara lebih kritis. Mereka menggambarkan pembangunan pangkalan sebagai bagian dari agenda geopolitik yang agresif, dengan memanfaatkan instabilitas politik Sudan dan aliansi dengan aktor non-demokratis. Meski demikian, di dalam negeri Rusia, jangkauan media internasional terbatas karena adanya kontrol informasi dan pembatasan akses terhadap media asing pasca invasi ke Ukraina pada 2022. Ini memungkinkan Kremlin memonopoli wacana domestik melalui media pro-pemerintah dan menekan potensi resistensi publik terhadap ekspansi militer luar negeri.

Keterlibatan kalangan akademisi dan pakar strategi juga tidak dapat diabaikan. Artikel dan opini dari lembaga *think-tank* pro-Kremlin seperti Russian International Affairs Council (RIAC) atau Valdai Discussion Club turut menyuarakan urgensi pembangunan pangkalan di Sudan dalam kerangka peningkatan multipolaritas dan penyeimbangan pengaruh Barat di kawasan Laut Merah. Mereka menyoroti bahwa Rusia tidak hanya berebut pengaruh militer, tetapi juga menunjukkan kapasitas sebagai kekuatan global yang mampu menjamin stabilitas kawasan sebagai argumen yang memperkuat daya legitimasi kebijakan di mata elite dan masyarakat Rusia.

Media sosial juga memainkan peran penting dalam memperluas dukungan terhadap kebijakan ini, baik melalui konten visual di platform seperti Telegram dan VKontakte, maupun propaganda digital yang disebarkan oleh bot dan akun pro-pemerintah. Dalam ekosistem informasi yang dikontrol dan dikurasi sedemikian rupa, Kremlin berhasil membentuk public sphere yang mendukung kebijakan ekspansi militer, termasuk pembangunan pangkalan di Sudan, sebagai kebijakan defensif dan strategis dalam konteks ketegangan global yang meningkat. Dengan demikian, *mass influencer* di Rusia beroperasi secara sinergis dengan aktor-aktor politik dan ekonomi lainnya untuk menciptakan dukungan sosial terhadap kebijakan luar negeri, termasuk pembangunan pangkalan militer di Laut Merah. Mereka

membentuk opini publik yang koheren dengan narasi negara, sekaligus mereduksi ruang oposisi agar kebijakan dapat dijalankan tanpa resistensi signifikan dari dalam negeri.

Kapabilitas Ekonomi dan Militer Rusia

Pada kerangka konseptual Coplin, kapabilitas ekonomi dan militer merupakan salah satu determinan utama dalam pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri suatu negara. Negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang besar memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menjalankan strategi politik luar negeri yang ekspansif dan memproyeksikan pengaruh ke kawasan strategis. Dalam konteks pendirian pangkalan militer di Port Sudan, kekuatan ekonomi dan militer Rusia menjadi faktor krusial yang menopang langkah strategis tersebut di tengah tekanan geopolitik global dan persaingan dengan negara Barat.

Rusia, sebagai salah satu kekuatan utama dunia dengan cadangan energi dan logam mulia yang besar, memanfaatkan kapabilitas ekonominya untuk mendukung strategi perluasan pengaruh luar negeri. Di tengah tekanan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat pasca-aneksasi Krimea tahun 2014 dan invasi Ukraina tahun 2022, Rusia terus mencari mitra ekonomi dan akses terhadap sumber daya strategis di kawasan Global South. Sudan, yang kaya akan emas dan uranium, menjadi mitra ideal dalam kerangka kebijakan diversifikasi ekonomi luar negeri Rusia.

Laporan BBC menyebut bahwa sejak tahun 2017, perusahaan-perusahaan Rusia seperti Meroe Gold, anak usaha dari Wagner Group, telah beroperasi di sektor pertambangan emas Sudan dan membentuk hubungan ekonomi yang erat dengan Kementerian Pertambangan Sudan (BBC, 2023). Melalui konsesi tambang dan pembagian hasil yang menguntungkan, Rusia mendapatkan akses langsung terhadap komoditas strategis yang penting dalam menopang stabilitas ekonominya, khususnya dalam menghadapi pembatasan akses pasar internasional. Selain itu, Rusia juga menawarkan bentuk investasi strategis dan bantuan ekonomi ke Sudan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, pasokan senjata, pelatihan militer, dan logistik sebagai bentuk diplomasi ekonomi. Penawaran ini dilihat sebagai barter strategis, di mana Rusia memberikan dukungan ekonomi dan militer sebagai imbal balik atas hak untuk membangun dan mengoperasikan pangkalan militer di Port Sudan selama 25 tahun (Aljazeera, 2020).

Dari sisi militer, Rusia memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia, dan dalam beberapa dekade terakhir mengembangkan kemampuan proyeksi kekuatan laut (*blue water navy*) sebagai bagian dari transformasi strategi globalnya. Angkatan Laut Rusia memiliki sejumlah kapal perang berkapasitas tinggi, termasuk kapal nuklir dan kapal serbu amfibi, yang memungkinkan penggelaran pasukan di luar negeri dalam jangka panjang (Africa Defense Forum, 2025). Pembangunan pangkalan militer di Laut Merah, tepatnya di Port Sudan, merupakan manifestasi dari upaya Rusia untuk memperluas jangkauan operasional militernya ke Afrika Timur dan Samudera Hindia. Pangkalan ini dirancang untuk menampung hingga empat

kapal perang, termasuk kapal bertenaga nuklir, serta sekitar 300 personel militer dan teknis (Tsamalashvili, 2025).

Kemampuan ini menunjukkan kesiapan logistik dan keuangan Rusia untuk mempertahankan kehadiran militer secara berkelanjutan di luar negeri. Selain instrumen militer konvensional, Rusia juga mengandalkan aktor militer non-negara seperti Wagner Group, yang berperan sebagai alat proyeksi kekuatan yang fleksibel. Keberadaan Wagner di Sudan, selain menjalankan operasi tambang, juga terlibat dalam pelatihan militer dan dukungan keamanan bagi pemerintah Sudan. Dengan berkurangnya kehadiran formal Wagner pasca-kematian Yevgeny Prigozhin pada tahun 2023, Rusia melalui Kementerian Pertahanan mengambil alih jaringan Wagner untuk melanjutkan operasi keamanan strategis di Afrika (Cam, 2024).

Strategi Rusia dalam pembangunan pangkalan militer di Port Sudan memperlihatkan sinergi antara kapabilitas ekonomi dan militer sebagai satu kesatuan kebijakan luar negeri. Pangkalan militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proyeksi kekuatan militer, tetapi juga sebagai pelindung jalur perdagangan strategis dan investasi Rusia di kawasan Afrika Timur. Dalam hal ini, kapabilitas militer mendukung dan mengamankan kepentingan ekonomi, sementara kekuatan ekonomi memberikan legitimasi dan insentif bagi mitra lokal untuk menerima kehadiran militer Rusia.

Kehadiran militer Rusia di Laut Merah juga meningkatkan posisi tawar Moskow dalam hubungan dagang global. Terutama terhadap negara-negara pengguna jalur pelayaran Laut Merah seperti India, Tiongkok, dan negara-negara Uni Eropa. Di tengah meningkatnya ancaman terhadap jalur perdagangan internasional dari kelompok bersenjata seperti Houthi di Yaman, posisi militer Rusia yang strategis dapat diproyeksikan sebagai kekuatan stabilisator regional (Kurnialam, 2020).

Dengan demikian, kapabilitas ekonomi dan militer menjadi pilar utama dalam mendukung kebijakan luar negeri Rusia di Laut Merah. Pembangunan pangkalan militer di Port Sudan merupakan contoh konkret bagaimana suatu negara memobilisasi kekuatan internalnya untuk menciptakan pengaruh eksternal. Dalam perspektif Coplin, kemampuan Rusia untuk memanfaatkan kombinasi antara sumber daya ekonomi, kekuatan militer, dan jaringan aktor non-negara secara strategis menunjukkan tingkat kapasitas nasional yang tinggi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri jangka panjang.

KESIMPULAN

Sebuah kebijakan luar negeri suatu negara diambil oleh pengambil kebijakan sebagai reaksi terhadap sebuah isu internasional yang sedang terjadi, ataupun sebagai tindakan antisipasi negara terhadap kemungkinan perkembangan isu internasional di masa mendatang. Sebelum membuat kebijakan luar negeri, pengambil keputusan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti konteks internasional, politik domestik, serta kapabilitas ekonomi dan militer negaranya. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, pengambil keputusan dalam penelitian ini

adalah Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menginisiasi pendekatan diplomatik ke Sudan sejak tahun 2020, hingga peresmian kebijakan pembangunan pangkalan militer Rusia oleh Sudan di tahun 2025.

Dalam mengambil keputusan tersebut, Presiden Rusia mempertimbangkan beberapa hal seperti, dukungan positif dari *policy influencer* dalam negeri, kemandirian ekonomi Rusia, serta kehadiran militer Rusia, baik di bawah Wagner ataupun Kementerian Pertahanan di Sudan. Dengan peresmian pembangunan pangkalan militer Rusia di Sudan, Rusia dapat meluaskan pengaruh geopolitiknya di kawasan Laut Merah, sejalan dengan tujuan politik luar negerinya untuk menciptakan *balance of power* dengan kekuatan Barat di Timur Tengah.

SARAN

Penelitian ini berfokus kepada perumusan kebijakan pembangunan pangkalan militer Rusia di Laut Merah, dengan Rusia sebagai fokus analisisnya. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan teori serta menggunakan sudut pandang pihak lain, seperti Sudan, untuk kebaruan penelitian. Dengan banyaknya penggunaan pendekatan dan sudut pandang lainnya, maka semakin lengkap pula penelitian dalam bidang analisis kebijakan luar negeri, khususnya dalam topik penelitian geopolitik di Laut Merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa Defense Forum. (2025, March 18). *Many Obstacles Remain For Russian Naval Base In Sudan*. From [adf-magazine.com](https://adf-magazine.com/2025/03/many-obstacles-remain-for-russian-naval-base-in-sudan/): <https://adf-magazine.com/2025/03/many-obstacles-remain-for-russian-naval-base-in-sudan/>
- Aljazeera. (2020, November 13). *Russia plans naval base in Sudan: The planned deal, published on the Russian government's website, outlines a 'logistical support centre' to be set up in Sudan*. From [Aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2020/11/13/russia-plans-naval-base-in-sudan): <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/13/russia-plans-naval-base-in-sudan>
- BBC. (2023, April 25). *Apa kepentingan tentara bayaran Rusia di Sudan?* From [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjqk0x7g0klo): <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjqk0x7g0klo>
- Cam, M. L. (2024, August 23). *Putin builds on Prigozhin's foundations in Africa*. From [lemonde.fr](https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2024/08/23/putin-builds-on-prigozhin-s-foundations-in-africa_6720461_124.html?utm_source): https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2024/08/23/putin-builds-on-prigozhin-s-foundations-in-africa_6720461_124.html?utm_source
- Coplin, W. D. (1974). *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
- Fatunnisa, H. (2025, February 13). *Sudan Izinkan Rusia Bangun Pangkalan Militer di Laut Merah*. From [rmol.id](https://www.rmol.id/):

<https://rmol.id/dunia/read/2025/02/13/656069/sudan-izinkan-rusia-bangun-pangkalan-militer-di-laut-merah>

- Handoyo, P. A. (2025). Kepentingan Djibouti dalam Menerima Pangkalan Militer Asing Tiongkok Tahun 2017. *Diplomacy and Global Security Journal*, 169-187. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3497>.
- Hasmi, H. R. (2023). FOREIGN POLICY AND MILITARY INVOLVEMENT Case Study Russia-Sudan Relationship. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 9, No.1.
- Kurnialam, A. (2020, December 10). *Rusia akan Membuka Pangkalan Militer di Sudan*. From internasional.republika.co.id: <https://internasional.republika.co.id/berita/ql3m4v459/rusia-akan-membuka-pangkalan-militer-di-sudan>
- Mohamedu, K. (2024). The Wagner Group, Russia's Foreign Policy and Sub-Saharan Afric. *Geneva Centre for Security Policy*.
- Neethling, T. (2023). Russia Para-Military Operations in Africa: The Wagner Group as De Facto Foreign Policy Instrument. *Scientia Militaria: Journal of Military Studies*.
- Pant, H. V., Joshi, Y. (2015). Indian Foreign Policy Responds to the U.S. Pivot. *Asia Policy* 19, 89-114. <https://dx.doi.org/10.1353/asp.2015.0012>.
- Schwikowski, M. (2025, January 1). *Pengaruh Rusia di Afrika Melemah Usai Jatuhnya Assad*. From [dw.com](https://www.dw.com): <https://www.dw.com/id/pengaruh-rusia-di-afrika-melemah-usai-jatuhnya-assad/a-71266036>
- Sudirman, M. A. (2024). *Analisis Terhadap Pembangunan Pangkalan Militer India di Mauritius*.
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (2023, March 31). *The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation*. From mid.ru: https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/
- Tsamalashvili, N. (2025, March 5). *Russia's Naval Base in Port Sudan: A Gateway to Africa and the Indian Ocean*. From horninstitute.org: https://horninstitute.org/russias-naval-base-in-port-sudan-a-gateway-to-africa-and-the-indian-ocean/?utm_source
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.